



Kognitariat: Eksploitasi Kelas Pekerja Kognitif dalam Era Ekonomi Pengetahuan

Choirul Hudha^{1*}, Permata Mohamad Salim²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Email: choirul.huda@ui.ac.id

Submitted: January 12, 2024

Accepted: May 10, 2024

Published: October 14, 2024

Abstract: *The development of technology in post-industrial society creates a knowledge economic system, with production that is not only based on things but also intensive knowledge. The workers who rely on knowledge and skills for the centre of their activities in the knowledge economy are called cognitive workers. The cognitive workers in the knowledge economy era just paid little attention to their rights and obligations. That's why they get unfair and fewer benefits during work and often get exploited and disadvantaged when they work. The cognitive workers who have the exploitation are called kognitariat. Therefore, this research is new, empirically and theoretically. It is about the exploitation experienced by cognitive workers. Researchers used literature studies obtained through the University of Indonesia library software (remote-lib.ui.ac.id), and search engines such as Google Scholar, Science Direct (Elsevier), JSTOR, Web of Science, and other journal directories by open access with the keyword, "cognitive worker", "knowledge-based economy", "exploitation in cognitive labour", "labour in knowledge era" and "kognitariat". The results of the research reveal that exploitation of cognitive workers because of the responsibility of work and overstepping working. Thus, the exploitations is not only based on a material, like the proletariat., but also at a supra structural basis, that's knowledge on the kognitariat.*

Keywords: Cognitive Workers; Kognitariat; Exploitation; Knowledge

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam masyarakat pasca industri melahirkan sistem ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), dengan produksi tidak bertumpu pada barang, tetapi padat pengetahuan (*knowledge intensive*). Dalam dua dekade terakhir, perkembangan ekonomi pengetahuan mendorong transisi komoditas ke arah kemajuan kognitif, seperti keterampilan teknologi (Andrés et al., 2015; Bolisani & Bratianu, 2017; Hadad, 2017), dan inovasi gagasan (Hope & Martelli, 2019; Miller & Ahluwalia, 2012). Nilai jual komoditasnya bergantung pada ide yang dihasilkan oleh pekerja kognitif, yaitu para pekerja di dalam ekonomi pengetahuan yang mengandalkan teknologi digital, pengetahuan, serta keterampilan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ide tersebut termanifestasikan dalam inovasi bisnis, rekomendasi kebijakan, diseminasi pengetahuan, analisis pasar, konten digital, dan lain sebagainya (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2010; Dalkir, 2011). Gagasan ekonomi pengetahuan muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi yang turut memberikan dampak pada transformasi ekonomi kontemporer (Drucker, 2012; Machlup, 1972).

Walaupun telah banyak diperbincangkan dalam ranah akademis maupun praktis, definisi mengenai ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) masih sulit

diterima secara universal (Hadad, 2017; Hope & Martelli, 2019). Ketika membicarakan ekonomi pengetahuan, Druker (2012) menggambarkannya sebagai bentuk manajemen pengetahuan yang dikelola oleh pekerja kognitif, transisi kerja dari otot menuju otak. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi pengetahuan tumbuh diberbagai praktek lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, *startup*, *e-commerce*, dan industri digital seperti film, desain grafis, dan game, serta berbagai lembaga konsultasi hukum, kesehatan hingga bisnis.

Ekonomi pengetahuan dicirikan oleh transformasi pengetahuan pekerja kognitif sebagai modal yang penting bagi produksi, akuisisi, dan pengembangan pengetahuan untuk meraup keuntungan yang berlanjut (Olsson & Peters, 2005). Dalam ekonomi pengetahuan, terdapat akumulasi kognitif yang disatukan oleh komputersisasi untuk menciptakan kekayaan (Durazzi & Geyer, 2019).

Budaya keterampilan dalam ekonomi pengetahuan juga begitu spesifik, yang mana proses produksi tidak mungkin digantikan oleh orang yang belum memiliki keterampilan dalam bidangnya (Lévy, 2001), misalnya untuk mendesain konten pekerjaannya tidak dapat dilakukan oleh seorang peneliti, dan begitu pula sebaliknya.

Dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, peran pekerja kognitif dalam aktivitas ekonomi sangatlah signifikan (Durazzi & Geyer, 2019; Tavoletti, 2010). Pekerja kognitif menjadi aktor penting dalam proses produksi dan distribusi barang, meneliti dan merekomendasi kebijakan (Miller & Ahluwalia, 2012). Pekerja kognitif menentukan keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomian pada era *knowledge economy* (Ibsen & Thelen, 2017). Namun, dibalik potensinya yang besar, pekerja kognitif tidak menyadari eksploitasi waktu, sehingga teralienasi dari ikatan sosialnya dan kesulitan untuk mengembangkan inovasi, "*...unlike the industrial labourer, the cognitive labourer considers work as the most important part of his life, no longer opposes the lengthening of the working day*" (Berardi, 2013).

Telah banyak studi dilakukan untuk menunjukkan kerentanan pekerja kognitif, misalnya pekerja kognitif dalam industri digital dihadapkan pada kerentanan kesehatan. Namun, mereka menganggap hal tersebut sebagai risiko dari sebuah pekerjaan (Miller, 2018; Piñón, 2019). Penelitian lain menyebutkan, bahwa pekerja kognitif mengalami hambatan inovasi kerja karena target produksi yang banyak (Curtin & Sanson, 2016). Hal yang tidak kalah menarik sekaligus memprihatinkan adalah pekerja kognitif tidak pernah dihadapkan pada permasalahan ekonomi karena memang mendapatkan upah di atas rata-rata sesuai dengan produksi yang dikerjakan dengan jam kerja yang tinggi (Cohn & Addison, 1998). Pada tahap ini, fleksibilitas kerja dan tingginya upah yang diterima oleh pekerja kognitif mampu menutupi eksploitasi kerja yang sebenarnya mereka alami.

Selain itu, pekerja kognitif di sektor penelitian kerap mendapatkan intimidasi karena hasil penelitian yang dikeluarkan berhasil memberikan dobrakan untuk menghegemoni peta politik (McQuade, 2015). Konten-konten kreatif pekerja kognitif juga terbukti masif menjadi penyulut perubahan revolusi politik di beberapa wilayah meskipun gerakan sosial yang dilakukan selalu berhasil diredam melalui ancaman upah kerja yang tidak diberikan (Banks & Hesmondhalgh, 2019; Iversen & Soskice, 2015). Dalam konteks Indonesia, peran-peran intimidatif seperti ini banyak dialami oleh akademisi, jurnalis, dan para aktivis organisasi masyarakat sipil. Namun

sayangnya, eksploitasi dan kerentanan yang dialami oleh para pekerja kognitif tersebut justru tidak pernah menjadi titik tumpu kesadaran bersama (Piñón, 2019).

Dalam konteks Indonesia, khususnya kebergantungan pada pekerja kognitif untuk mengelola modal produksi dalam proses ekonomi tidak diiringi dengan payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara komprehensif. Autentifikasi hasil pengetahuan pekerja hingga regulasi izin usaha yang tidak memadai juga menjadi akar masalah bagi pekerja kognitif, sehingga mereka rentan mengalami eksploitasi (Diessner et al., 2022; Gandini, 2016). Temuan dari beberapa studi di atas telah mengkonfirmasi bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi pengetahuan tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan para pekerjanya, karena mereka justru harus berhadapan pada kelebihan waktu kerja (*overtime*) dan beban kerja yang lebih (*overwork*) (Novianto & Keban, 2021).

Berdasarkan situasi permasalahan tersebut, penulis berargumen bahwa eksploitasi tidak hanya terjadi pada basis material seperti yang terjadi pada pekerja proletariat, tetapi juga terjadi pada basis suprastruktur yaitu aspek kognitif. Pekerja kognitif yang mengalami eksploitasi inilah yang disebut kognitariat (Berardi, 2013; Miller & Ahluwalia, 2012). Dalam ekonomi pengetahuan, proses produksi pekerja kognitif dilakukan secara sukarela dan di bawah kesadaran, serta mengorbankan waktu kerja yang cenderung lebih panjang. Konsekuensi alam bawah sadar ini, membawa para pekerja kognitif tereksplorasi karena merasa paling bertanggung jawab dan menjadi bagian paling penting dari sebuah proses produksi (Ibsen & Thelen, 2017; Kennedy, 2010).

Oleh karena itu, penelitian ini hendak menjelaskan eksploitasi yang dialami kognitariat sebagai *novelty* empiris dan teoritis dalam perdebatan kelas pekerja dan perkembangan ekonomi pengetahuan itu sendiri, serta dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana proses ketidakadilan kerja terjadi dalam era ekonomi pengetahuan sehingga melahirkan kelas pekerja kognitariat? Penelitian terhadap kelas pekerja kognitif menarik untuk dilakukan karena kelas pekerja ini muncul dari pergeseran besar dalam kapitalisme akhir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menyajikan perdebatan atas eksploitasi tenaga kerja kognitif yang dianggap berbeda dengan kelas pekerja lain seperti buruh pabrik pada era ekonomi konvensional (McQuade, 2015; Kennedy, 2010).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Pencarian literatur dilakukan secara ekstensif terhadap artikel yang menggambarkan dinamika ketidakadilan kerja bagi pekerja kognitif. Metode studi literatur dipilih karena tidak hanya mampu untuk mengidentifikasi permasalahan secara aktual, seperti sektor kerja kognitif dalam bidang dan wilayah tertentu, tetapi juga mengelaborasi perdebatan kontekstual mengenai keadilan kerja pada era ekonomi pengetahuan. Berbeda dengan penelitian studi literatur yang dilakukan oleh (Farras & Fathiah, 2021; Hidayat, 2022), ada lima langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan literatur dalam penelitian ini. *Pertama*, merumuskan pertanyaan penelitian; *kedua*, melakukan pencarian terhadap artikel yang relevan; *ketiga*, melakukan pemilihan artikel; *keempat*, menganalisis hasil dan mengintegrasikannya; *kelima*, menuangkan informasinya (Rousseau et al., 2008; Tranfield et al., 2003).

Penelitian tentang eksploitasi pekerja kognitif dalam ekonomi pengetahuan sangat penting karena memberikan kebaruan ilmiah dalam perdebatan kelas pekerja dan nilai dari ekonomi pengetahuan itu sendiri, termasuk perkembangan produksi serta strategi kebijakannya. Secara khusus, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana proses ketidakadilan kerja terjadi dalam era ekonomi pengetahuan sehingga melahirkan kelas pekerja kognitariat? Berbagai referensi jurnal dan buku berbahasa Inggris diperoleh melalui perangkat lunak perpustakaan Universitas Indonesia (remote-lib.ui.ac.id) dan mesin pencari seperti *Scencedirect* (Elsevier), *Web of Science*, *Google Scholar* dan direktori jurnal akses terbuka lainnya dengan kata kunci "*cognitive worker*", "*knowledge based economy*", "*exploitation in cognitive labor*", "*labor in knowledge era*" dan "*cognitariat*".

Dari hasil pencarian tersebut, terhimpun 59 artikel, dan dipilih 34 artikel jurnal yang telah dianalisis dan dipilih, yang mana substansinya berkaitan dengan penelitian mengenai manajemen ekonomi pengetahuan, kondisi pekerja kognitif, dan ketidakadilan kerja sehingga memunculkan kelas kognitariat. Analisis dilakukan dengan cara memilah literatur yang paling relevan terhadap konsep eksploitasi dan kerangka perkembangan ekonomi pengetahuan. Tingkat relevansi ditentukan dari sumber serta olah data, substansi, dan abstrak literatur yang kemudian dicatat, lalu dikurasi dan disimpulkan substansinya. Penelitian ini memiliki limitasi karena hanya mengupas perkembangan ekonomi pengetahuan pada aspek sosiologisnya saja, meskipun ekonomi pengetahuan memiliki bias dan bersinggungan dengan multidisiplin ilmu yang lain. Selain itu, topik penelitian ini juga sulit untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat mikro, seperti keadaan dan latar belakang kehidupan pekerja kognitif secara personal.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Topik utama dalam penelitian ini terletak pada eksploitasi kerja dan corak ekonomi pengetahuan, yang mana fokus utama produksi di dalam ekonomi ini ditentukan oleh kekuatan pengetahuan. Oleh karena itu, diskursus mengenai hak serta kewajiban pekerja dalam ekonomi ini tidak hanya memperdebatkan basis material seperti halnya dalam ekonomi konvensional, melainkan juga meninjau aspek pengetahuan yang didiseminasikan. Penelitian ini tidak hanya mencoba menangkap *gap* dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga menawarkan tinjauan lain mengenai perdebatan eksploitasi kerja pada basis suprastruktur dengan merujuk pada akar konseptual kerja dan kepentingan kelas yang perlu dikupas lebih mendalam.

a. Ekonomi Konvensional Menuju Era Ekonomi Pengetahuan

Globalisasi dan revolusi teknologi mentransformasikan ekonomi konvensional menuju arah kontemporer berbasis pengetahuan, yang disebut sebagai ekonomi pengetahuan. Masyarakat dalam ekonomi pengetahuan dengan demikian menjadi masyarakat belajar, yang penuh adaptasi dengan hal baru, dan mengarah pada pembentukan manusia yang mampu berkontribusi pada pengembangan kompetensi mereka sendiri, untuk berintegrasi sepenuhnya dalam konteks sosial dan ekonomi (McDowell & Dyson, 2011; Tavoletti, 2010).

Ekonomi pengetahuan sangat bergantung pada kemampuan kognitif dan keterampilan yang sangat terspesialisasi, digabungkan secara strategis dari berbagai bagian dalam rantai nilai ekonomi untuk menciptakan inovasi (Broström et al., 2021).

Ekonomi berbasis pengetahuan ditandai dengan transformasi pengetahuan sebagai bahan dasar, modal, produk, dan produksi dalam ekonomi, yang perputaran, akuisisi, dan pengembangannya menjadi dominan serta menentukan perolehan jaminan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang (Durazzi, 2019).

Terdapat beberapa perbedaan corak produksi antara ekonomi konvensional dan ekonomi pengetahuan. Dalam ekonomi pengetahuan, terdapat kelimpahan produksi kognitif yang dihasilkan pekerja kognitif, tidak seperti ekonomi konvensional yang deterministik pada aspek material. Dengan demikian, jika dalam ekonomi konvensional sumber daya dan material berkurang ketika diproduksi, di dalam ekonomi pengetahuan, baik sumber daya manusia, informasi, maupun pengetahuan tidak berkurang, sebaliknya dapat dibagi dan ditingkatkan (Dalkir, 2011; Edvinsson, 2002). Keterkaitan antara ekonomi dan pengetahuan dalam *knowledge economy* didasarkan pada cara untuk mengelola waktu dan jarak, informasi serta pengetahuan yang dinamis. Terdapat situasi yang adaptif karena peranan teknologi di dalamnya, sekaligus menekankan keunggulan kompetitif pada kegunaan multi fungsi untuk menggandakan komoditas semaksimal mungkin (Hadad, 2017).

Tidak seperti ekonomi konvensional, dalam ekonomi pengetahuan, proses produksi tidak terkendala masalah lokasi dan waktu karena kegiatan produksi dilakukan secara virtual berbasis teknologi. Namun, muncul kesulitan dalam menerapkan peraturan secara nasional seperti izin usaha, pajak, dan hak dari pekerja kognitif, sehingga fleksibilitas kerja justru menjadikan pekerja kognitif sebagai prekariat (Nissen, 2006). Disamping itu, dalam ekonomi pengetahuan, harga suatu produk atau layanan ditentukan oleh aktivitas pengetahuan, keterampilan, dan waktu kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, tidak bergantung pada nilai materialnya (Hope & Martelli, 2019).

Dalam ekonomi konvensional, modal hanya dapat dijelaskan dalam istilah finansial yang berwujud, sedangkan dalam ekonomi pengetahuan, modal berubah menjadi tidak berwujud. Inovasi memainkan peran utama dalam ekonomi pengetahuan dan sangat bergantung pada proses manajerial untuk menangani, menyimpan, dan membaginya (Bolisani & Bratianu, 2017). Oleh karena itu, produksi yang ditentukan oleh aktivitas pengetahuan dengan kerentanan payung hukum yang sulit ditentukan, menjadi tolak ukur bahwa eksploitasi sangat mungkin untuk terjadi (Thompson & Curella, 2021).

Ekonomi berbasis pengetahuan mempromosikan inovasi dan inisiatif menjadi modal produksi serta mengubah paradigma pembangunan yang mengarah pada peningkatan nilai dan pendidikan yang belum pernah terjadi pada era ekonomi sebelumnya. Prioritas utamanya berfokus pada pendidikan, keterampilan, dan pelatihan kejuruan. Hanya dengan cara-cara tersebutlah yang memungkinkan para pekerjanya berintegrasi ke dalam proses kerja yang cepat. Ekonomi pengetahuan juga mempertimbangkan peningkatan intensitas pengetahuan baru dan peningkatan teknologi dalam kegiatan ekonominya (Hudson, 2011). Transformasi yang terjadi dalam *knowledge economy* tentu membuat perubahan yang cukup signifikan dalam semua lini ekonomi, terutama pada aspek sosial, kultural, dan regulasi di ranah struktur industri, sekaligus memberikan kebaruan atas diskursus dikalangan kelas pekerja.

b. Eksploitasi dan Alienasi Kerja

Gagasan kerja abstrak yang dikemukakan oleh para Marxian kini dapat diperdebatkan kembali pada era ekonomi pengetahuan. Hal tersebut beralasan karena sekalipun ekonomi pengetahuan mendukung fleksibilitas kerja, namun pemerasan waktu dan beban kerja tetap terjadi, bahkan tanpa memperhatikan utilitas konkrit dalam sebuah produksi. Dalam ekonomi pengetahuan, komoditas yang diperdagangkan berkaitan erat dengan aspek kognitif, produktivitas pekerja kognitif tidak berkutat pada barang material, melainkan pada operasi pengerjaan data, algoritma, dan teknologi yang berbeda dengan pekerja dalam ekonomi konvensional. Eksploitasi pada pekerja kognitif juga terjadi karena pada saat yang bersamaan, proses kerja menjadi bagian dari mental dan penguasaan terhadap pengetahuan yang lebih spesifik sehingga proses produksi dilakukan dengan sukarela, sulit dipertukarkan, serta menjadi bagian paling penting yang menguasai pikiran pekerja kognitif (Berardi, 2013).

Dalam ekonomi pengetahuan yang serba cepat mengikuti arus teknologi, dan berubah dengan masif, proses kognitif dianggap sebagai akumulasi ekonomi, yang berujung pada ekspansi ekonomi ke dalam ranah kesadaran. Bekerja tidak lagi dimaknai sebagai keinginan atau pengejaran kenikmatan atas kekayaan yang berusaha untuk diperoleh, melainkan berganti pada proses produksi yang cenderung meluas dan dapat menunjang nilai tukar, cepat, serta penuh persaingan. Pada tahap ini, eksploitasi kepada para kognitariat terjadi sehingga memungkinkan untuk bekerja sebanyak mungkin, di mana saja dan kapan saja (Schor, 1991).

Akumulasi dari kesukarelaan menuju ketidaksadaran akibat merasa paling bertanggung jawab hingga menuju kepatuhan kerja disebabkan oleh penjabaran tugas kerja yang mengikuti masifnya perubahan teknologi (McQuade, 2015). Ada pergeseran budaya dari ranah kerja industri menuju ranah kerja kognitif, dengan asumsi pekerja kognitif cenderung memperpanjang waktu kerja atas kemauannya sendiri akibat mekanisme kerja dan standarisasi teknologi sehingga menciptakan ikatan emosional antara pekerja dan barang produksi (Diessner et al., 2022; Kennedy, 2010). Keadaan demikian yang kemudian menyebabkan keterasingan sosial antara pekerja kognitif satu dengan yang lain sehingga tidak memunculkan kesadaran dan perjuangan kelas.

Dalam kesehariannya, waktu kerja yang begitu tinggi membuat para pekerja kognitif seperti terlepas dari relasi keluarga dan lingkungan serta sedikit sekali mendapatkan kepastian status di tengah masyarakat, sehingga bekerja menjadi satu-satunya proses sosial yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan kehidupan. Pada akhirnya, iklim persaingan di antara para pekerja kognitif tidak dapat dihindarkan, tidak ada solidaritas yang terbentuk diantara para kognitariat sehingga muncul alienasi yang cukup signifikan sesama pekerja kognitif. Akibatnya, perjuangan untuk memperoleh regulasi yang ramah akan hak dan perlindungan terhadap pekerja kognitif tidak pernah terwujud (Ibsen & Thelen, 2017; Piñón, 2019).

Pada hakikatnya, alienasi yang terjadi pada pekerja kognitif disebabkan karena kepadatan kerja sehingga waktu yang tersisa untuk menikmati kehidupan dan sisi sosial yang lain menjadi makin sedikit (Kalekin-Fishman & Langman, 2015). Alienasi juga berarti semakin banyak para pekerja kognitif menginvestasikan energi untuk target kerja, maka semakin sulit menginvestasikan tenaganya untuk kebahagiaan. Pekerja kognitif yang mengalami alienasi akan memiliki adaptasi yang

kurang baik dengan lingkungan sosial, cenderung mengalami bias untuk memposisikan diri saat bekerja dan berinteraksi sehingga menutup diri untuk terlibat dalam gerakan yang sifatnya komunal (Shantz et al., 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi menuju ekonomi pengetahuan ditandai dengan ketidakstabilan dan fluktuasi yang timbul karena campuran dari fenomena revolusi teknologi (kemajuan teknologi yang pesat, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi) serta percepatan globalisasi (internasionalisasi dalam ekonomi dunia dan perubahan yang disebabkan oleh wacana global). Meskipun ekonomi pengetahuan secara langsung menitikberatkan pada produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan serta informasi secara terstruktur, tetapi muncul tantangan pada pemerataan agensi yang memiliki, menggunakan, dan mentransfer pengetahuan secara merata dalam menggerakkan proses produksi (Hadad, 2017). Oleh karena itu, manusia, pengetahuan, dan teknologi perlu disinergikan untuk memfasilitasi peningkatan nilai tambah pada tingkat organisasi, komunitas, dan/atau tingkat ekonomi makro. Ada beberapa komponen yang mencirikan corak ekonomi pengetahuan dan membedakannya pada ekonomi konvensional, di antaranya adalah;

Tabel 1. Komponen Ekonomi Pengetahuan Menurut Para Ahli (Hadad, 2017)

| Ahli | Komponen 1 | Komponen 2 | Komponen 3 | Komponen 4 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Tapscott (2014) | Pengetahuan | Digitalisasi | Virtualisasi | - |
| Karlsson (2009) | Pengetahuan produksi | Keterampilan distribusi | - | - |
| White, et.al. (2012) | Inovasi | Keterampilan | Manajerial | Kreativitas |
| Nycz (2007) | Informasi | Lokalitas | Inovasi | System |
| Chauvel & Despres (2002) | Data | Informasi | Pengetahuan | Kebijakan |
| Stewart (1997) | manusia | Struktur pasar | Pelanggan | - |

Dalam ekonomi konvensional, aktivitas ekonomi membagi individu menjadi tiga aktor, yakni pekerja, pemberi kerja, dan pembeli. Orang pertama harus bekerja untuk orang kedua guna memenuhi kebutuhan orang ketiga. Dengan melakukan aktivitas tersebut, ketiga aktor akan mendapatkan manfaat, menerima upah, memperoleh keuntungan, dan utilitas. Berbeda dengan aktivitas ekonomi konvensional, dalam ekonomi pengetahuan, perputaran komoditas ditentukan oleh empat aktor dengan tanggung jawab ekonomi yang berbeda, yaitu pembuat, pelaku, administrator, dan pelanggan. Dari keempat aktor ini, pekerja kognitif sering berada pada lapis pertama dan kedua.

Tabel 2. Aktor dalam Aktivitas Ekonomi Pengetahuan (Tome, 2020)

| | Pembuat | Pelaku | Pemilik dan Administrator | Pelanggan dan Warga Negara |
|--------------|--|--|---|--|
| Nilai | Kerja adalah kepuasan tersendiri | Diakui eksistensinya sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat; mencari nafkah, berusaha melakukan mobilitas sosial | Mengendalikan langsung sebuah usaha atau memimpin proses produksi | Meningkatkan gaya hidup untuk menunjukkan status sosial |
| Objektivitas | Kerja merupakan proses kreativitas untuk bersenang-senang. Namun, beban dan waktu kerja yang terlalu berlebihan justru mematikan inovasi dan mengeksploitasi | Proses produksi dan kerja terlalu tinggi bebannya | Menghasilkan atau meraup keuntungan yang lebih. | Menikmati produk, menunjukkan suatu standar hidup, dan merasakan kualitas barang maupun jasa |
| Metode | Berbasis riset, inovasi, keterampilan, dan pengetahuan yang berbobot | Pelatihan profesional | Koneksi pasar bebas dan globalisasi. | Web, <i>market place</i> dan internet |
| Hasil | Eksplotasi kerja, di sisi lain muncul apresiasi terhadap produk yang dihasilkan | Akumulasi pendapatan yang tidak sebanding dengan eksploitasi | Kekayaan terakumulasi | Konsumsi yang mencolok sebagai penanda kelas sosial tertentu |

Sejalan dengan komponen dan aktor yang terlibat dalam aktivitasnya, ekonomi berbasis pengetahuan lalu hadir mengubah perekonomian dengan mengevaluasi kembali peran inovasi kognitif sebagai proses inti produksi dan sebagai faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Ada tantangan dan ancaman yang muncul dari pergeseran ekonomi ini bukan hanya berada di dalam ranah produksi (komponen), melainkan juga membuka kembali perdebatan mengenai hak dan kewajiban para pekerjanya (Berardi, 2013). Dalam ekonomi pengetahuan, diskursus pekerja kognitif memasuki babak baru yang menuntut perkembangan keterampilan yang cepat, pengetahuan yang kuat dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan kondisi tersebut tentu berpengaruh pada beban tanggung jawab kerja yang begitu besar terhadap pekerja.

Eksistensi sosial bagi para pekerja kognitif tidak dapat direduksi dalam kacamata kecerdasannya saja, melainkan juga harus diselidik dalam perspektif hak pekerjaannya, perlindungan kerja, dan dinamika sosialnya. Di samping itu, transformasi kerja yang terjadi dari ekonomi konvensional menuju pada ekonomi pengetahuan juga harus memperhatikan dimensi psikis dan ikatan sosial pekerja kognitif. Ada pertarungan sosial yang dialami pekerja kognitif ketika dihadapkan pada proses akumulasi ekonomi pada era *knowledge economy*, sedangkan di sisi lain regulasi yang menjadi payung hukum atas hak dan perlindungan kerja mereka belum hadir secara komprehensif.

Selain itu, makna kerja yang terbentuk di dalam ekonomi pengetahuan juga mengalami pergeseran. Di era ekonomi pengetahuan, kerja digambarkan dengan optimalisasi pengetahuan untuk mencari pangsa pasar, mengevaluasi sebuah kebijakan, mengupas suatu fenomena sosial, dan mengoptimalkan teknologi untuk memproduksi gagasan serta kemudahan, bahkan hiburan. Meskipun kegiatan produksi di dalam ekonomi pengetahuan tetap membutuhkan gerak fisik, namun, ada tanggung jawab spesifik yang diemban, proses produksinya tidak dapat dikompromikan atau digantikan oleh orang yang belum, bahkan tidak memiliki kompetensi di bidangnya.

Alih-alih memiliki basis eksploitasi berbeda dengan proletariat, Kennedy (2010) justru menjelaskan bahwa para kognitariat berada dalam sirkulasi kapital yang sama dengan proletariat. Pengetahuan tidak dapat berdiri tunggal dalam menciptakan nilai tambah secara terpisah, tetapi berkelindan menjadi bagian dari totalitas tenaga kerja yang hidup dan tunduk pada kapitalisme. Dengan kata lain, nilai suatu komoditas dalam ekonomi pengetahuan, tidak dapat diambil dari ide dan kecerdasan semata, ada peran lain di belakang layar yang juga dikerjakan oleh buruh konvensional. Dalam istilah Marxis, pengetahuan, ide, dan material mempunyai nilai sosio-ekonomi yang konstan dan terkontrol pada lini produksi (Løwendahl et al., 2001).

Klaim yang menyatakan bahwa pekerjaan berbasis pengetahuan dan konvensional memiliki perbedaan kerap didasarkan pada analisis alat produksinya semata, yakni pengetahuan di kepala yang memerlukan otonomi mandiri serta tidak dimiliki secara merata oleh semua pekerja, layaknya pembagian tugas kerja dalam ekonomi konvensional dengan keterampilan yang berbeda (Kennedy, 2010). Padahal, pekerjaan berbasis pengetahuan adalah bagian dari tenaga kerja yang hidup, dan apa yang digambarkan sebagai ekonomi pengetahuan didasarkan pada keterkaitan antara tenaga kerja berwujud/tidak berwujud, yang bisa dikatakan didasarkan pada pondasi yang sama dengan kapitalisme industri konvensional (Powell & Snellman, 2004). Hanya saja, wacana kognitif atas keterampilan operasi perangkat lunak, keterampilan analisis, maupun kemampuan interaksi dalam mempresentasikan sebuah proyek, tidak dianggap atau belum banyak diperbincangkan sebagai sebuah keterampilan pada era ekonomi konvensional (Thompson & Curella, 2021).

Oleh karena itu, muncul berbagai kritik terhadap argumen pemisahan eksploitasi yang terjadi dalam bentuk-bentuk pekerjaan non-materi yang dibayar tinggi dan dilakukan oleh pekerja berstatus tinggi, yakni mereka yang memiliki modal pendidikan dalam jumlah besar dengan pekerja buruh konvensional. Dalam perdebatan kognitariat, sebagian besar hal yang belum dijelajahi dalam tradisi ini adalah perkembangan pembagian kerja yang didasarkan pada semakin

meningkatnya pengucilan sosial terhadap pekerja yang modal budaya dan kognitifnya tidak serasi untuk melakukan jenis pekerjaan non-materi tertentu (Kennedy, 2010). Ketika atribut pengetahuan, prinsip, dan gaya dari individu pekerja menjadi semakin penting dari proses produksi, maka struktur ketidaksetaraan baru akan berkembang, yang memungkinkan lahirnya tantangan baru dalam membentuk kesadaran kelas. Pada titik ini, kognitariat akan mengalami diferensiasi kerja yang tentu menjadi lebih rentan digoyahkan oleh kapital (McDowell & Dyson, 2011).

Dalam era ekonomi pengetahuan meskipun ruang intelektual terbuka lebar, namun, realitanya justru menjadi kekuatan eksploitasi baru yang mengancam eksistensi pekerja kognitif. Hal tersebut didasarkan bahwa dalam era kapitalisme akhir, eksploitasi tidak lagi ditentukan oleh besarnya modal, melainkan bertransformasi pada tersedianya tenaga kerja yang terampil sehingga kepemilikan kognitif sangat bernilai dalam menggantikan modal material. Salah satu hal yang paling terlihat, yaitu adanya sistem magang dalam pendidikan dan penelitian sebagai bentuk cadangan inovasi dan surplus tenaga kerja (Olsson & Peters, 2005). Secara khusus, kemampuan kognitif ditujukan untuk meningkatkan produksi ideologi yang mengartikulasikan budaya, simbol dan interaksi yang menunjang fetisisme komoditas sebagai bentuk kontrol pasar (McDowell & Dyson, 2011).

Dengan memahami konteks tersebut, mungkin dapat lebih memperjelas pola eksploitasi yang terjadi pada kognitariat saat ini, yang mana pekerja berbasis pengetahuan dianggap sebagai produsen dan dipaksa memikul beban ganda dengan pekerjaan lainnya, misal sebagai inovator atau instruktur dari pekerja kognitif yang lebih muda. Maka, menjadi tidak heran jikalau para pekerja seperti peneliti, pengajar, ataupun konsultan memainkan banyak peran dan tanggung jawab kerja yang melewati batas (McQuade, 2015). Dengan kata lain, aspek kognitif semakin direduksi menjadi sebuah komoditas tunggal yang mencakup semua hal. Nilai guna dari komoditas tersebut dipakai menjadi modal yang bervariasi. Sama seperti halnya proletariat, kognitariat juga tidak mendapatkan poin kerja layak seperti jam kerja, stabilitas, dan jaminan sosial meskipun secara upah dapat dikatakan cukup (Novianto & Keban, 2021).

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang memisahkan eksploitasi yang terjadi dalam ekonomi konvensional maupun pengetahuan, hanya bergeser pada hubungan nilai yang berkuat di dalamnya. Pekerjaan berbasis pengetahuan menghasilkan nilai lebih produksi sebagai bagian dari tenaga kerja yang dihargai oleh modal karena tambahan pengetahuannya saja, seperti halnya para buruh konvensional yang dihargai lebih karena tenaganya untuk bekerja lembur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Marx yang menyatakan bahwa produksi kerja mencakup pemikiran yang digabungkan dengan tindakan untuk meningkatkan surplus produksi, sebagai hakikat segala aktivitas manusia dalam arti luas (Løwendahl et al., 2001). Faktanya, pekerjaan berbasis pengetahuan merupakan pengejawantahan kapitalisme akhir industri modern, yang mana proses pembagian kerjanya semakin terspesialisasi secara rinci sehingga eksploitasinya tidak disadari oleh pekerja kognitif. Meminjam istilah Kennedy (2010) fenomena ekonomi pengetahuan layaknya anggur baru yang diperoleh dari botol tua.

Pada fase selanjutnya, ekonomi pengetahuan justru melahirkan sebuah kesenjangan antara pekerja terampil, berketerampilan rendah, dan tidak terampil, yang mana kemudian kapitalisme akhir bekerja dengan menciptakan pendidikan kejuruan sesuai dengan permintaan pasar (Thompson & Curella, 2021). Ketika teknologi dan komunikasi semakin berkembang dalam proses ekonomi dan menciptakan pendidikan berdasarkan pasar, maka aspek kognitif kemudian bukan hanya lagi sebagai faktor yang berkontribusi dalam produksi, tetapi muncul menjadi kekuatan pendorong kapitalisme modern, yang disebut sebagai kapitalisme kognitif (Hardt & Negri, 2009).

Dasar dari kapitalisme kognitif adalah hegemoni kerja kognitif dengan tujuan menghasilkan nilai lebih, yang mana nilai tersebut justru lebih menonjol dibandingkan komoditas fisik sehingga menciptakan hubungan sosial yang juga mengaburkan batasan antara kerja, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan (McQuade, 2015). Eksploitasi bukan lagi berada di tempat kerja, tetapi seluruh jaringan hubungan yang membentuk kehidupan; mencakup pengetahuan, gagasan, ide, mental, hingga relasi sosial kognitariat. Kapitalisme kognitif juga memberikan tekanan pada lembaga pendidikan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pasar yang berdampak pada bergesernya pendidikan ideal dan bertambahnya beban kerja pengajar sehingga tenaga pendidik menjadi kognitariat (McDowell & Dyson, 2011).

E. KESIMPULAN

Kesimpulan teoritis yang dapat ditemukan dari penelitian ini adalah eksploitasi kerja tidak hanya terjadi pada basis material seperti halnya yang terjadi pada proletariat, melainkan juga terjadi pada basis struktur gagasan dan pengetahuan para kognitariat. Penelitian ini juga menghasilkan kebaruan empiris bahwa para kognitariat tidak hanya mengalami eksploitasi kerja sebab tingginya produksi dan jam kerja, melainkan juga mengalami keterpisahan dari ikatan sosial keluarga maupun masyarakat di mana mereka tinggal, sebab merasa paling bertanggung jawab atas produksi dan beban kerja ganda.

Dalam ekonomi pengetahuan yang serba cepat berubah, proses produksi dianggap sebagai akumulasi ekonomi, yang berujung pada ekspansi ekonomi ke dalam ranah kesadaran. Bekerja tidak lagi dimaknai sebagai keinginan atau pengejaran kenikmatan atas kekayaan yang berusaha untuk diperoleh, melainkan berganti pada proses produksi yang ekspansif dan dapat menunjang nilai tukar, cepat, serta penuh persaingan. Pada tahap ini eksploitasi terhadap kognitariat terjadi sehingga memungkinkan untuk bekerja sebanyak mungkin, di mana saja dan kapan saja. Diskursus kerja layak kini telah memasuki babak baru, yang mana ukuran kelayakan kerja bukan lagi surplus pendapatan dan menjangkau segala aspek kehidupan (daya beli meningkat) melainkan waktu penuh individu untuk mengembangkan keterampilan dan tetap terjaga dengan ikatan sosial.

Dari pembahasan yang telah diurai, diperlukan tawaran untuk menciptakan iklim ekonomi pengetahuan menjadi lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan tiga level. Level pertama ada pada tataran makro, dalam hal ini pemerintahan yang perlu menerbitkan regulasi hukum untuk mengatur perizinan usaha dan mengakomodir hak dari pekerja kognitif. Level kedua ada di tataran meso, yang mana seyogyanya para pekerja kognitif membentuk serikat dan membangun solidaritas bersama serikat buruh lainnya untuk memperjuangkan kerja yang lebih

adil dan layak. Level ketiga ada di tataran mikro, yakni pekerja kognitif itu sendiri. Pekerja kognitif perlu memiliki kesadaran atas tanggung jawab dan hak kerja agar tidak rentan terhadap eksploitasi serta membangun kesadaran tersebut sesama pekerja.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Permata Mohamad Salim yang telah bersedia meluangkan waktu, berdiskusi, dan memberikan saran atas proses penulisan artikel ini. Kami juga berterima kasih pada Dr. Indera Ratna Irawati Pattinasarany, MA selaku pembimbing yang juga turut memberikan semangat serta masukan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrés, A. R., Asongu, S. A., & Amavilah, V. (2015). The Impact of Formal Institutions on Knowledge Economy. *Journal of the Knowledge Economy*, 6(4), 1034–1062. <https://doi.org/10.1007/s13132-013-0174-3>.
- Banks, M., & Hesmondhalgh, D. (2019). Internationalizing Labor Activism: Building Solidarity among Writers' Guilds. In M. Curtin & K. Sanson (Eds.), *Precarious Creativity* (pp. 267–280). University of California Press. <https://doi.org/10.1515/9780520964808-022>.
- Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2010). *Knowledge management: Systems and processes*. M.E. Sharpe.
- Berardi, F. (2013). What does Cognitariat Mean? Work, Desire and Depression. *Cultural Studies Review*, 11(2), 57–63. <https://doi.org/10.5130/csr.v11i2.3656>.
- Bolisani, E., & Bratianu, C. (2017). Knowledge strategy planning: An integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. *Journal of Knowledge Management*, 21(2), 233–253. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2016-0071>.
- Broström, A., Buenstorf, G., & McKelvey, M. (2021). The knowledge economy, innovation and the new challenges to universities: Introduction to the special issue. *Innovation*, 23(2), 145–162. <https://doi.org/10.1080/14479338.2020.1825090>.
- Cohn, E., & Addison, J. T. (1998). The Economic Returns to Lifelong Learning in OECD Countries. *Education Economics*, 6(3), 253–307. <https://doi.org/10.1080/09645299800000021>.
- Curtin, & Sanson, S. (2016). *Precarious Creativity: Global Media, Local Labor* (University of California, Santa Barbara, M. Curtin, & K. Sanson, Eds.). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/luminos.10>.
- Dalkir, K. (2011). *Knowledge management in theory and practice* (2nd ed). MIT Press.
- Diessner, S., Durazzi, N., & Hope, D. (2022). Skill-Biased Liberalization: Germany's Transition to the Knowledge Economy. *Politics & Society*, 50(1), 117–155. <https://doi.org/10.1177/00323292211006563>.
- Drucker, P. (2012). *Post-Capitalist Society* (ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080938257>.
- Durazzi, N. (2019). The political economy of high skills: Higher education in knowledge-based labour markets. *Journal of European Public Policy*, 26(12), 1799–1817. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1551415>.

- Durazzi, N., & Geyer, L. (2019). Social inclusion in the knowledge economy: Unions' strategies and institutional change in the Austrian and German training systems. *Socio-Economic Review*. <https://doi.org/10.1093/ser/mwz010>.
- Edvinsson, L. (2002). *Corporate longitude: Navigating the knowledge economy*. BookHouse Pub.
- Farraz, M. A., & Fathiah, A. (2021). Alat Analisis Strategi Bertahan Hidup Sektor Informal Perkotaan Selama Pandemi Covid-19: Review Literatur. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.25077/jsa.7.1.1-10.2021>.
- Gandini, A. (2016). Digital work: Self-branding and social capital in the freelance knowledge economy. *Marketing Theory*, 16(1), 123-141. <https://doi.org/10.1177/1470593115607942>.
- Hadad, S. (2017). Knowledge Economy: Characteristics and Dimensions. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 5(2), 203-225. <https://doi.org/10.25019/MDKE/5.2.03>.
- Hardt, M., & Negri, A. (2009). *Empire*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjnrw54>.
- Hidayat, T. (2022). Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan Pada Anak-Anak Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 87-98. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.87-98.2022>.
- Hope, D., & Martelli, A. (2019). The Transition to the Knowledge Economy, Labor Market Institutions, and Income Inequality in Advanced Democracies. *World Politics*, 71(2), 236-288. <https://doi.org/10.1017/S0043887118000333>.
- Hudson, R. (2011). From Knowledge-based Economy to ... Knowledge-based Economy? Reflections on Changes in the Economy and Development Policies in the North East of England. *Regional Studies*, 45(7), 997-1012. <https://doi.org/10.1080/00343400802662633>.
- Ibsen, C. L., & Thelen, K. (2017). Diverging Solidarity: Labor Strategies in the New Knowledge Economy. *World Politics*, 69(3), 409-447. <https://doi.org/10.1017/S0043887117000077>.
- Iversen, T., & Soskice, D. (2015). Democratic Limits to Redistribution: Inclusionary versus Exclusionary Coalitions in the Knowledge Economy. *World Politics*, 67(2), 185-225. <https://doi.org/10.1017/S0043887115000039>.
- Kalekin-Fishman, D., & Langman, L. (2015). Alienation: The critique that refuses to disappear. *Current Sociology*, 63(6), 916-933. <https://doi.org/10.1177/0011392115591612>.
- Kennedy, P. (2010). The Knowledge Economy and Labour Power in Late Capitalism. *Critical Sociology*, 36(6), 821-837. <https://doi.org/10.1177/0896920510376998>
- Lévy, P. (2001). *Cyberculture*. University of Minnesota Press.
- Løwendahl, B. R., Revang, Ø., & Fosstenløkken, S. M. (2001). Knowledge and Value Creation in Professional Service Firms: A Framework for Analysis. *Human Relations*, 54(7), 911-931. <https://doi.org/10.1177/0018726701547006>.
- Machlup, F. (1972). *The production and distribution of knowledge in the United States*. Princeton Univ. Pr.
- McDowell, L., & Dyson, J. (2011). The other Side of the Knowledge Economy: 'Reproductive' Employment and Affective Labours in Oxford. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 43(9), 2186-2201. <https://doi.org/10.1068/a43591>.

- McQuade, B. (2015). Cognitive Capitalism and Contemporary Politics: A World Historical Perspective. *Science & Society*, 79(3), 363–387. <https://doi.org/10.1521/siso.2015.79.3.363>.
- Miller, T. (2018). Cybertarian Flexibility. In *Precarious Creativity: Global Media, Local Labor*. University of California Press.
- Miller, T., & Ahluwalia, P. (2012). The cognitariat. *Social Identities*, 18(3), 259–260. <https://doi.org/10.1080/13504630.2012.669532>.
- Nissen, M. E. (2006). *Harnessing Knowledge Dynamics: Principled Organizational Knowing & Learning*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-773-7>.
- Novianto, A., & Keban, yeremias. (2021). Mendorong Kerja Layak & Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. IGPA Press.
- Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. *Journal of Education Policy*, 20(3), 313–345. <https://doi.org/10.1080/02680930500108718>.
- Piñón, J. (2019). 10. Complex Labor Relations in Latin American Television Industries. In M. Curtin & K. Sanson (Eds.), *Precarious Creativity* (pp. 132–145). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520964808-012>.
- Powell, W. W., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. *Annual Review of Sociology*, 30(1), 199–220. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100037>.
- Rousseau, D. M., Manning, J., & Denyer, D. (2008). 11 Evidence in Management and Organizational Science: Assembling the Field's Full Weight of Scientific Knowledge Through Syntheses. *Academy of Management Annals*, 2(1), 475–515. <https://doi.org/10.5465/19416520802211651>.
- Shantz, A., Alfes, K., & Truss, C. (2014). Alienation from work: Marxist ideologies and twenty-first-century practice. *The International Journal of Human Resource Management*, 25(18), 2529–2550. <https://doi.org/10.1080/09585192.2012.667431>.
- Tavoletti, E. (2010). Matching Higher Education with the Labour Market in the Knowledge Economy: The Much-Needed Reform of University Governance in Italy. *Industry and Higher Education*, 24(5), 361–375. <https://doi.org/10.5367/ihe.2010.0007>.
- Thompson, J. P., & Curella, C. (2021). Democratizing the Knowledge Economy: Will Labor Accept the Challenge? *New Labor Forum*, 30(3), 20–28. <https://doi.org/10.1177/10957960211037252>.
- Tome, E. (2020). Actors in the Knowledge Economy: A Typology. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 8(4), 451–461. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0029>.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.